

UPAYA KEMENTERIAN BUMN DALAM RANGKA PENERAPAN ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PADA BUMN

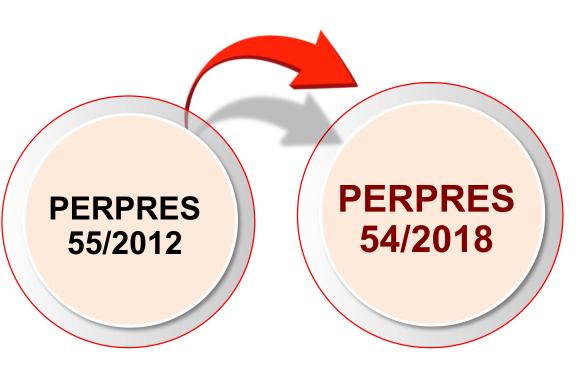
Yogyakarta, 14 Maret 2020

MATERI PEMBAHASAN

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Aksi MAS Stranas PK Tindak Pidana Korupsi **STRANAS PK** Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi Regulasi Tata Kelola Pada Kementerian BUMN



Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



Tugas Timnas

- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Stranas PK
- 2. Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK
- 3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat





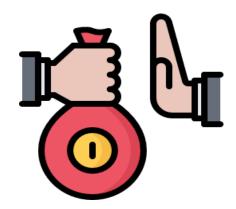






AKSI MAS STRANAS PK





AKSI #5 STRANAS PK: MANAJEMEN ANTI SUAP DI PEMERINTAH & SEKTORSWASTA (DUNIA USAHA)

Target Keberhasilan

- 1. Meningkatnya penerapan sistem manajemen anti suap di sektor swasta/ badan usaha
- 2. Meningkatnya para profesional anti suap di sektor swasta/badan usaha



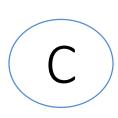
Kriteria Keberhasilan

Diterapkannya sistem manajemen anti suap bagi sektor swasta (dan badan usaha) dengan diterapkannya ISO 37001, Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha, UK Bribery Act, FCPA, atau panduan anti suap yang sejenis lainnya



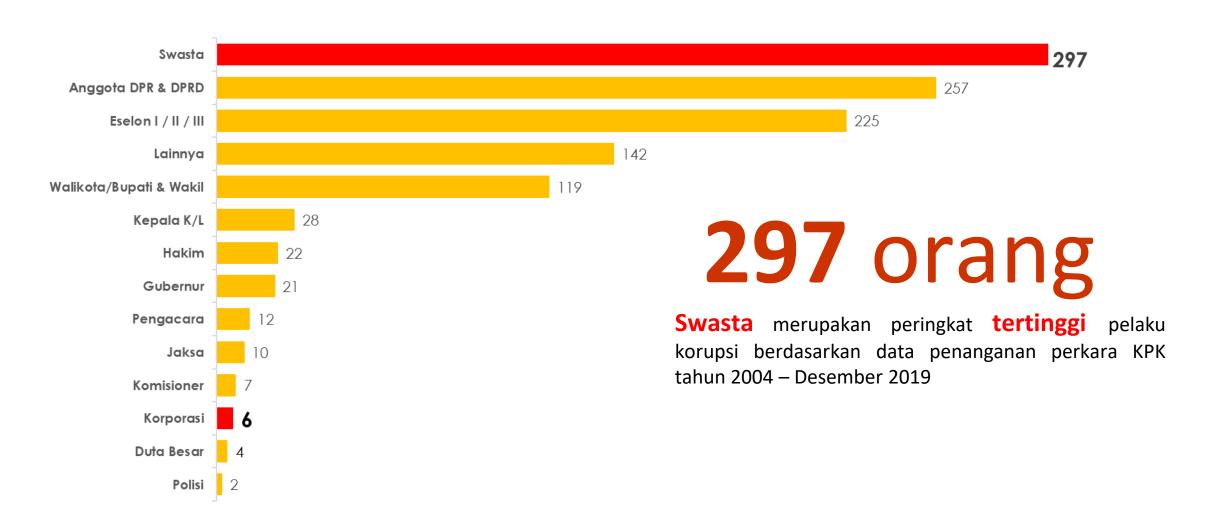
- Kementerian BUMN → Perusahaan BUMN
- Kementerian Dalam Negeri → Perusahaan BUMD
- Otoritas Jasa Keuangan → Industri Jasa Keuangan (Bank & Non Bank)
- SKKMIGAS → Perusahaan K3S

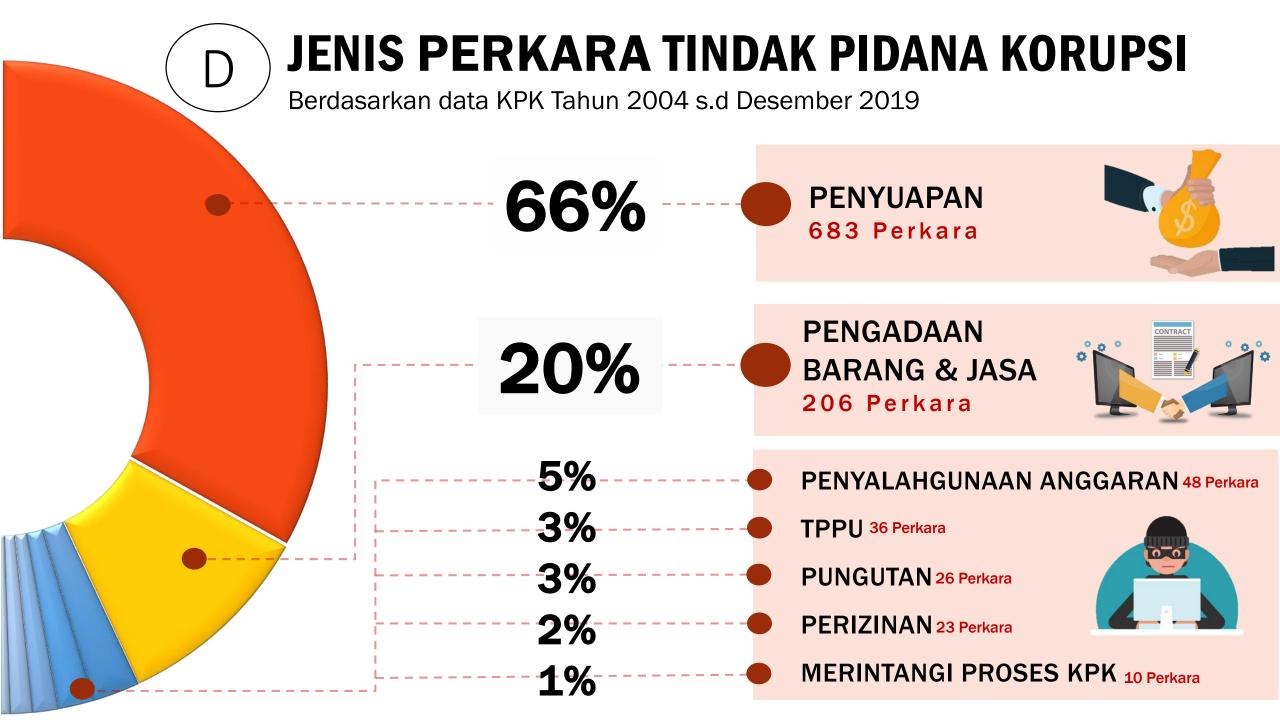




Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 - DES 2019







Regulasi Tata Kelola Pada Kementerian BUMN





Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN

Reff. PER-01/MBU/2011

Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan

Reff. PER-19/MBU/2012

Program Pengendalian Gratifikasi diLingkungan Kementerian BUMN

Reff.PER-05/MBU/2014

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian BUMN

Reff. PER-01/MBU/01/2018

Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian BUMN

Reff. PER-13/MBU/10/2015

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN

Reff. PER-01/MBU/01/2015

Pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan KKN, penanganan benturan kepentingan, dan penguatan pengawasan intern

Reff. SE-02/MBU/07/2019

Ketaatan pada Ketentuan Peraturan perundangundangan dalam rangka penerapan GCG

Reff. SE-7/MBU/12/2019

Larangan memberikan souvenir atau sejenisnya

Reff. SE-8/MBU/12/2019

Penerapan etika dan/atau kepatutan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan

Reff. SE-9/MBU/12/2019

2011 – 2018 | Peraturan Menteri



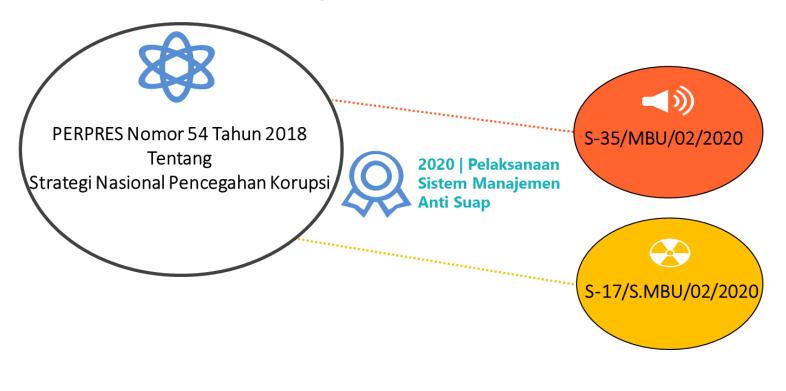




2019 | Surat Edaran

Regulasi Tata Kelola Pada Kementerian BUMN





- Semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 2. Perolehan sertifikat ISO 37001:2016 sebelum tanggal 17 Agustus 2020
- 3. Menunjuk PIC yang bertanggungjawab penuh terhadap proses sertifikasi
- 4. Kementerian BUMN monitoring berkala perkembangan sertifikasi ISO 37001:2016

Sertifikasi ISO 37001:2016

... harus sudah diperoleh BUMN sebelum tanggal 17 Agustus 2020 "...

Namun demikian, perolehan sertifikasi tersebut baru langkah awal, dan langkah selanjutnya adalah implementasi sistemnya, sehingga permasalahan terkait dengan korupsi dapat dikurangi, bahkan dihilangkan.

TERIMA KASIH BUMN Untuk Indonesia



